



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**

***PRESS RELEASE***  
**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020  
PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN POSO DAN SIGI**

**PALU, 20 MEI 2021**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

***Press Release***

**Pemda Poso dan Sigi kembali meraih WTP**

PALU – Humas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi Tahun 2020. Hal ini disampaikan pada saat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah **Slamet Riyadi** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi Tahun 2020. LHP tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso **Sesi Kristina Dharmawati Mapeda**, Bupati Poso **Verna G.M. Inkiriwang**, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sigi **Rahmat Saleh** dan Bupati Sigi **Mohamad Irwan**

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sigi **Samuel Yansen Pongi**, para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah **Slamet Riyadi** menyampaikan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Poso dan Sigi telah meraih opini WTP, namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang wajib ditindaklanjuti. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi untuk terus memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mewakili sambutan pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD Kabupaten Sigi, **Rahmat Saleh** mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah kabupaten poso dan sigi serta jajarannya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Besar harapannya agar Opini yang diraih dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan penyerahan LHP ini dapat bermanfaat bagi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasannya, dan mengharapkan pemerintah daerah menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang terdapat di dalam LHP – LHP BPK sebelumnya, jelas **Rahmat**.

Selanjutnya Bupati Poso, **Verna Ingkiriwang** menyampaikan terima kasih atas hasil pemeriksaan yang telah diserahkan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi dan akan berupaya segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK yang masih terdapat dalam LHP ini.

Pada kesempatan ini BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Poso dan Sigi. IHPD yang kami sampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020 di wilayah Sulawesi Tengah yang meliputi 14 LHP LKPD, 4 LHP DTT, dan 3 LHP Kinerja. IHPD juga memuat informasi penting terkait capaian indikator ekonomi makro daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, profil BUMD dan BLUD, serta hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Penyampaian IHPD ini diharapkan bermanfaat bagi DPRD dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan berguna bagi Pemerintah Provinsi terutama dalam menyusun kebijakan keuangan daerah.

**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

**BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Jalan Moh. Yamin No. 84 Kota Palu

0451-486622 | f. 0451-486633 | e. [bpkpalu@gmail.com](mailto:bpkpalu@gmail.com)